

## ABSTRAK

Dalam upaya membangun kota/kabupaten yang bersih, tertib dan indah, pemerintah daerah seringkali melakukan penataan PKL yang kontraproduktif. Saat ini, Pemkot Bandung masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan dan penertiban dengan merelokasikan PKL di tempat-tempat yang telah disediakan. Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL sering dihadapkan oleh persoalan ketidaksesuaian harapan PKL atas lokasi baru. Salah-satu kawasan yang menjadi perhatian Pemkot Bandung dalam relokasi PKL adalah kawasan Cicadas. Pelaksanaan relokasi PKL di kawasan Cicadas memiliki beberapa keunikan yaitu kelompok PKL ini yang memiliki ikatan kelompok (solidaritas) yang kuat dan memiliki status kepemilikan atas prasarana usaha. Pada pelaksanaannya, relokasi PKL tersebut tidak berjalan efektif karena ketidaksesuaian lokasi baru dengan kemampuan dan kebutuhan usaha PKL. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima" (Studi Kasus di Kawasan Cicadas Kota Bandung).

Acuan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang terdiri dari: mudah tidaknya masalah yang akan digarap; kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat dan variabel di luar perundangan yang mempengaruhi implementasi.

Berdasarkan karakteristik penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menjadi instrumen penelitian. Informan penelitian terdiri dari PKL yang mengalami relokasi ke BTM, Satpol PP Kota Bandung dan aparat PD. Pasar Bermartabat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Teknik validasi data menggunakan triangulasi data serta analisis data dengan menggunakan teknik penyajian informasi, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam konteks mudah tidaknya masalah yang akan digarap. Kebijakan relokasi sulit dilaksanakan berkaitan dengan kesadaran PKL masih kurang untuk menerima relokasi dan tidak tepatnya penyediaan Mall sebagai lokasi baru; Dalam hal kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat diperoleh belum optimalnya sosialisasi petugas tentang relokasi disertai kurangnya pembentukan kesadaran PKL ke arah yang dikehendaki; variabel di luar perundangan yang mempengaruhi implementasi kebijakan diperoleh bahwa kondisi eksternal menentukan keberhasilan kebijakan. Kondisi kemiskinan ekonomi dan kondisi keamanan memengaruhi pelaksanaan kebijakan; Terdapat faktor disposisi (sikap) pelaksana yang menentukan efektifitas pelaksanaan kebijakan PD. Pasar Bermartabat tidak menunjukkan sikap (disposisi) yang mendukung atas pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Cicadas. Hal terlihat dari ketidak seriusannya dalam menyediakan BTM sebagai lokasi baru yang tidak sesuai dengan harapan PKL.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, relokasi, PKL.